

Peran politik pemuka agama Islam dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020

Muhammad Rizqon Nur Hafidh¹, Samsuri².

¹Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

²Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk peran politik pemuka agama Islam dalam proses pemilihan umum kepala daerah langsung Di Kabupaten Klaten tahun 2020; (2) menjelaskan apakah terdapat relasi antara pemuka agama Islam dengan elit politik peserta Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020; dan (3) mendeskripsikan bagaimana dampak minimnya pengetahuan politik masyarakat membuat rendahnya kedewasaan demokrasi di Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis *ex post facto*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat berbagai bentuk peran politik yang dilakukan oleh pemuka agama Islam dalam menghadapi Pilkada di Kabupaten Klaten tahun 2020. Kedua, bahwa terdapat berbagai bentuk relasi antara pemuka agama dengan elit politik peserta Pilkada. Ketiga, Terdapat reaksi yang berbeda terkait dampak minimnya pengetahuan politik masyarakat membuat rendahnya kedewasaan demokrasi di Kabupaten Klaten. Hal ini berpengaruh kepada seberapa urgensinya peran politik pemuka agama Islam dalam masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to: (1) identify the shape of the political role of Islamic religious leaders in the process of direct regional head elections in Klaten Regency in 2020; (2) explain whether there is a relationship between Islamic religious leaders and the political elite participating in the 2020 Klaten Regency Pilkada; and (3) describe how the impact of the lack of public political knowledge makes democratic maturity low in Klaten Regency. This research is a qualitative descriptive research with *ex post facto* type. Techniques used to collect data are interview techniques, and documentation. The results of this study indicate that: First, there are various forms of political roles carried out by Islamic religious leaders in facing the Pilkada in Klaten Regency in 2020. Second, that there are various forms of relations between religious leaders and the political elite participating in the Pilkada. Third, there are different reactions related to the impact of the lack of public political knowledge making the maturity of democracy in Klaten Regency low. This affects the urgency of the political role of Islamic religious leaders in society.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

pemuka agama Islam,
kebebasan politik,

Keywords:

Islamic religious leaders,
political freedom,

Pendahuluan

Klaten memiliki sisi religiusitas yang cukup tinggi dengan berbagai upacara-upacara keagamaan yang sudah menjadi taradisi turun temurun Di Klaten. Tradisi tersebut mulai dari Yaqowiyyu yang ada Di Jatinom, besik sendang yang ada Di Ceper, syawalan yang ada Di Kalikotes, sadranan yang hampir di seluruh wilayah, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hal itu membuktikan bahwa masih kentalnya adat istiadat yang berasal dari pemuka agama setempat terutama agama Islam dengan bukti hasil akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal yang kemudian masih dijaga dengan baik hingga saat ini, Amaliah, E.I (2015:41).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten pada tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa warga yang beragama Islam Di Klaten lebih mayoritas dibandingkan dengan

agama-agama lain. Di Klaten menurut data dari Kemenag Kabupaten Klaten, persentase penduduk yang beragama Islam di Klaten menjadi mayoritas dengan Islam 1.073.271 (93%), Katholik 37.769 (3,27%), Kristen Protestan 34.942 (3,03%), Hindu 7.136 (0,6%), dan Budha 922 (0,08%), BPS Kab. Klaten (2015).

Peta politik di Kabupaten Klaten cukup dikenal masyarakat seluruh Indonesia dengan terkenalnya Klaten sebagai kandang banteng. Kandang banteng yang dimaksud adalah sebutan untuk sebuah wilayah yang setiap terlaksananya pemilihan umum dan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut politik selalu dimenangkan oleh partai politik bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Purbaya, A (2020). Tak hanya itu, di Klaten juga memiliki kondisi perpolitikan yang cukup buruk dengan adanya politik dinasti yang terjadi sejak tahun 2000 hingga saat ini. Kondisi ini dimulai dari bupati Klaten bernama Haryanto Wibowo yang menjabat mulai dari tahun 2000-2005 yang kemudian diteruskan oleh Sunarno yang memiliki masa jabatan sampai 2015 dan terpilih 2 periode menjadi bupati Klaten. Periode kedua Bupati Sunarno memiliki pasangan Sri Hartini yang tak lain adalah istri Haryanto Wibowo yang merupakan Bupati Klaten tahun 2000-2005. Setelah Sunarno tidak lagi bisa mencalonkan diri karena sudah memenuhi 2 periode kepemimpinan, Sri Hartini dan wakilnya yakni Sri Mulyani yang tak lain adalah istri Sunarno maju dan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten tahun 2015-2020. Namun ditengah jalan Sri Hartini tersandung kasus korupsi yang membuatnya dibui dan jabatan bupati diteruskan oleh wakilnya yang bernama Sri Mulyani dan pada Pilkada tahun 2020 terpilih lagi menjadi bupati Kabupaten Klaten periode 2020-2025 bersama wakilnya Yoga Hardaya, Tempo.co (2017). Salah satu indikator bahwa Kabupaten Klaten memang merupakan kandang banteng adalah jika dilihat dari persentase anggota DPRD Kabupaten Klaten, PDIP merupakan partai yang paling memiliki banyak kursi dalam DPRD Kabupaten Klaten, Sekretariat DPRD Kab. Klaten (2020).

Pengaruh pemuka agama Islam di Klaten cukup besar hingga dapat mengubah pandangan seseorang tentang suatu objek atau subjek terutama dalam hal berpolitik. Peran pemuka agama Islam ini sangat penting dalam proses kampanye pasangan calon yang berlaga, karena pada saat kampanye inilah para pasangan calon turun ke masyarakat terutama kepada para pemuka agama. Fungsi pemuka agama ini adalah sebagai salah satu jalan bagi pasangan calon bupati untuk meraup suara. Cara yang sering dilakukan oleh para pasangan calon adalah dengan mendatangi pemuka agama Islam tersebut dan memintanya untuk menyuruh jamaah dan orang-orang di sekitarnya untuk memilih pasangan calon yang dimaksud. Idealnya pemuka agama Islam adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat di sekitarnya dan jamaah yang percaya kepada beliau, Amaliah, E.I (2015: 39).

Sosok pemuka agama Islam seharusnya mencerminkan sifat kenabian seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti *siddiq* yang berarti jujur, jujur dengan apa yang telah dikatakannya dan disampaikannya. Amanah yang berarti pemuka agama tersebut dapat dipercaya oleh setiap orang yang mempercayainya sebagai tokoh agama. *Tabligh* yang berarti pemuka agama itu harus bisa menyampaikan apa yang diketahuinya dan tentunya yang disampaikan haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan entah di dunia maupun di akhirat. *Fatanah* yang berarti cerdas, cerdas menyampaikan segala sesuatunya sesuai dengan proporsionalnya, Sakdiyah (2016: 38).

Peran-peran politik yang dapat dilakukan oleh sosok pemuka agama Islam adalah seperti peran pengabdian terhadap masyarakat dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan terkhusus pengetahuan politik untuk menghadapi fenomena-fenomena politik di sekitarnya. Terdapat peran dakwah yang mana perihal dakwah memang peran pokok sosok pemuka agama Islam. Peran dakwah bagi pemuka agama Islam ini dapat menjelaskan hingga ke ranah politik karena dalam syariat Islam, kehidupan politik merupakan bagian dari syariat Islam. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak

mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam, Ridwan (2017: 224). Fungsi peran pemuka agama Islam dalam fenomena ini adalah untuk menjaga masyarakat untuk tetap memilih secara rasional sesuai dengan syariat yang ada. Tugas pemuka agama dalam mengenalkan, mendidik dan mensosialisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan politik sehingga tercipta masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang politik secara Islam minimal dalam ruang lingkup terdekatnya, Toweren (2018: 263).

Dalam praktiknya, jika dilihat dari relasi antara pemuka agama Islam dengan elit politik yang ada di Pilkada Kabupaten Klaten ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada saat Pilkada Kabupaten Klaten berlangsung tidak terlihat signifikan hubungan antara pemuka agama Islam dengan elit politik yang maju sebagai bakal calon ataupun calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten periode 2020-2024, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam terkait dengan topik ini. Relasi antara pemuka agama Islam dengan elit politik peserta Pilkada Klaten 2020 ini adalah hal yang membudaya dengan intensitas yang selalu terulang setiap terjadi proses Pemilu baik di tingkat kepala desa hingga bupati di Kabupaten Klaten ini, Ridwan (2017: 230).

Setelah menelisik tentang relasi antara pemuka agama Islam dan elit politik peserta Pemilu Kabupaten Klaten 2020, hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak peran serta pemuka agama Islam dalam kancah politik daerah di Kabupaten Klaten terkhusus di masa Pilkada Kabupaten Klaten 2020. Seperti yang terjadi di kebanyakan daerah jika pemimpin kelompoknya bertindak sesuatu pastilah ada dampaknya ada pengaruhnya terutama pada anggota kelompoknya. Contohnya adalah ketika ada perayaan *Yaqowiyyu* yang diadakan oleh pemuka agama di daerah Jatinom tepatnya di Makam Ki Ageng Gribig. Kebanyakan masyarakat di Klaten yang masih menganut paham konservatif memandang sesuatu yang telah diperintahkan dan dilaksanakan bertahun-tahun harus dijaga dan dipertahankan dari gesekan globalisasi zaman modern ini, Mona & Ikhsanudin (2014: 105). Masyarakat Klaten percaya dengan mengikuti saran dari pemuka agama yang dipuja-pujanya maka pilihannya akan tepat, barokah, dan menuntunnya ke jalan aman walau kenyataannya belum tentu.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penopang wawasan politik masyarakat klaten dan sekitarnya untuk lebih memperhatikan pola-pola politik yang ada di sekitarnya karena pada dasarnya fenomena-fenomena politik sangat berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, Nambo A.B. & Puluholua, M.R (2005:262). Winataputra & Budimansyah (2012; 31), "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk keperibadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building". Ketika masyarakat tak memiliki pengetahuan politik yang cukup yang didapat dari mempelajari konsep-konsep politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maka yang terbentuk adalah sebuah masyarakat dengan budaya politik kaula atau bahkan partisipan. Karena pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, karena jika didasarkan pada tujuannya, PPKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai civic education mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan kewarganegaraan yang mendidik warga negara untuk memiliki pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, Nurmalisa, A.M & Rohman (2020: 35).

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini merupakan sebuah penelitian *ex-post facto* yang digunakan untuk menjabarkan bagaimana peran Pemuka Agama Islam dalam proses Pilkada di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebagaimana dijelaskan oleh McMillan dan Schumacher (dalam Sandu Sitoyo, 2015: 27) dimana penelitian ini mengamati dampak sikap politik seorang pemuka agama Islam terhadap Pilkada Klaten 2020 terkhusus dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya, bagaimana bentuk-bentuk sikap politik hingga bagaimana reaksi masyarakat terhadap sikap politik seorang pemuka agama Islam yang

kemudian akan menjadi output sebuah tindakan partisipatif masyarakat dalam pergelaran Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020.

Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten dengan mengambil dari beberapa wilayah yakni Kecamatan Ceper, Trucuk, dan Karanganyar. Peneliti hanya mengambil beberapa wilayah karena memiliki kondisi serupa yakni persebaran kelompok agama cukup merata sehingga argumen atau pendapat yang dilontarkan narasumber akan sesuai dengan gejolak apa yang ada dalam masyarakat. Selain itu persebaran pemuka agama Islam juga cukup merata dimana di setiap dukuh yang ada di Klaten dapat dipastikan memiliki minimal satu pemuka agama Islam yang dihormati masyarakat sekitarnya.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive yaitu pengambilan narasumber yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya, Sugiyono (2015). Kriteria yang ditentukan oleh penulis untuk mengambil narasumber data agar penelitiannya sesuai dengan tujuan yang telah ditulis di atas adalah para Pemuka Agama Islam di sebuah daerah yang memiliki umat/jamaah/pengikut yang cukup signifikan dan juga sering diundang ke berbagai acara di masyarakat seperti pengajian, hajatan, rapat organisasi/LSM dan acara-acara lainnya. Sehingga dengan adanya kriteria tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenaran datanya.

Selain itu kriteria khusus yang diterapkan penulis yakni pemuka agama Islam yang dalam masyarakat berstatus sebagai ustadz, gus dan kyai. Seorang pemuka agama secara umum harus memiliki peranan penting dan utama dalam aspek keagamaan. Peranan pemuka agama terkait keagamaan diantaranya memimpin upacara agama, memimpin tempat suci keagamaan, dan mengajarkan pendidikan agama kepada masyarakat, Citramanik, L.G.R, & Laksmi, N.K.P.A (2019). Teknik penentuan narasumber secara purposif ini dilakukan dengan dipilih tanpa kaitan dengan organisasi agama Islam manapun dan penentuannya berdasarkan kepada pemuka agama Islam yang berkenan untuk diwawancarai.

Dalam penentuan narasumber ini peneliti juga menentukan kriteria tidak menggunakan dasar pekerjaan karena antara kehidupan sebagai pemuka agama dan pekerjaan itu bukanlah hal yang menentukan apa yang akan diutarakan narasumber dalam proses wawancara dan yang terpenting adalah tokoh tersebut memang memiliki andil dalam sosialisasi, pengajaran, dan dakwah agama Islam baik di lingkup masyarakat sekitar kediaman beliau maupun ruang lingkup sosial yang lebih luas.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009: 317). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berdialog, bercengkrama langsung, dan saling mengobrol dengan subjek dalam penelitian ini yakni Pemuka Agama Islam dari berbagai organisasi tentang topik yang diangkat dalam penelitian ini. Prosesnya adalah peneliti merumuskan beberapa pertanyaan terlebih dahulu mengenai topik yang diteliti sehingga pada saat melakukan wawancara, pertanyaan tidak sampai melebar tanpa arah.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan dan gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih kredibel atau dapat dipercaya, Sugiyono (2009: 329). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep dokumentasi berupa foto, rekaman audio, dan dokumen-dokumen lainnya untuk mempermudah penulis dalam merangkum berbagai data yang ada sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan mudah.

Teknik Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data, penulis menggunakan teknik Cross Check dimana peneliti melakukan Cross Check data hasil penelitian langsung kepada narasumber sesuai dengan kriteria narasumber yang telah tertulis di atas. Caranya adalah peneliti mengecek hasil data kepada Pemuka Agama Islam dari berbagai daerah di sekitar tempat tinggal peneliti menggunakan teknik sampel sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai bukti yang telah penulis Kumpulkan.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat di kabupaten Klaten yang terkhusus berada di dekat rumah penulis yakni di sekitar Kec. Ceper, Kec. Karangnom dan Kec. Trucuk. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian pada beberapa pemuka agama Islam yang dirasa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti seorang Pemuka Agama Islam di sebuah daerah yang memiliki umat/jamaah/pengikut yang cukup signifikan dan juga sering diundang ke berbagai acara di masyarakat seperti pengajian, hajatan, rapat organisasi/LSM dan acara-acara lainnya.

Tabel 1

Banyaknya pondok pesantren, kyai/ustadz dan santri tahun 2016-2020.

Wilayah Kabupaten	Banyaknya Pondok Pesantren, Kyai/Ustadz dan Santri								
	Pondok Pesantren			Kyai/Ustadz			Santri		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kabupaten Klaten	31	31	61	378	620	569	3.272	4.932	8.276

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Klaten 2021.

Dengan jumlah pemuka agama yang cukup banyak maka pengaruh elektabilitas peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ada di Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020 ini juga ditentukan dengan bagaimana pandangan-pandangan pemuka agama yang ada. Lokasi penelitian ini juga tidak terlalu dipilih secara matematis dengan pertimbangan demografi persebaran agama karena Di Kabupaten Klaten ini umat Islam dan pemuka agama Islam sendiri tersebar luas di seluruh pelosok Kabupaten Klaten dengan persentase 30% hingga 50% penduduk setiap kecamatan yang ada. Sehingga dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti menentukan lokasi berdasarkan kesediaan pemuka agama Islam untuk diwawancarai dan hasilnya ada beberapa pemuka agama Islam di beberapa kecamatan sekitar domisili peneliti yang berkenan untuk diwawancarai.

Tabel 2

Jumlah Tempat Peribadatan tahun 2018-2020

Wilayah Kabupaten	Jumlah Tempat Peribadatan (Unit)														
	Masjid			Mushola				Gereja Katolik			Gereja Kristen			Pura	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kabupaten Klaten	2860	2929	3071	1714	1716	1796	71	64	71	139	135	139	47	47	47

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Klaten tahun 2021.

Dalam masyarakat Klaten, setiap desa dan bahkan setiap dukuh memiliki tempat peribadatan masing-masing dimana disetiap tempat peribadatan tersebut pasti terdapat minimal satu pemuka agama dan terkhusus pemuka agama Islam. Dengan jumlah sebanyak itu, suara yang diproduksi dari pemuka agama tidak dapat dipandang remeh oleh setiap pasangan calon yang berlaga dalam kontestasi Pemilu apapun di Kabupaten Klaten mulai dari pemilihan lurah hingga pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten 2020

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) population (thousand)
01 Prambanan	52 592
02 Gantiwarno	38 144
03 Wedi	51 442
04 Bayat	61 191
05 Cawas	56 101
06 Trucuk	77 206
07 Kalikotes	37 051
08 Kebonarum	19 289
09 Jogonalan	59 628
10 Manisrenggo	43 242
11 Karangnongko	36 304
12 Ngawen	45 235
13 Ceper	64 305
14 Pedan	46 942
15 Karangdowo	42 515
16 Juwiring	57 764
17 Wonosari	62 115
18 Delanggu	41 041
19 Polanharjo	40 065
20 Karanganom	45 219
21 Tulung	51 850
22 Jatimomong	58 953
23 Kemalang	38 547
24 Klaten selatan	44 316
25 Klaten tengah	40 421
26 Klaten utara	49 028

Sumber: BPS Kab.Klaten 2021.

Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan banyaknya kyai/ustadz Di Kabupaten Klaten yang tercatat maka persentase jumlah pemuka agama Islam di Klaten adalah sekitar 4,5%, yang mana jumlah itu cukup untuk menarik suara dalam ajang Pilkada sebanyak 45% suara rakyat yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai syarat. Syarat yang dimaksud adalah seberapa besar pengaruh pemuka agama Islam di domisili tempat tinggalnya atau di daerah dawahnya, seberapa kharismatik sosok pemuka agama Islam tersebut, hingga seberapa pandai pemuka agama Islam tersebut menggurung pandangan masyarakat terhadap salah satu tokoh politik yang dituju.

Informan Yang Terlibat

Informan atau narasumber yang penulis ambil juga tidak sembarangan, harus memenuhi kriteria yang penulis terapkan yakni seorang Pemuka Agama Islam di sebuah daerah yang memiliki ummat/jamaah/pengikut yang cukup signifikan dan juga sering diundang ke berbagai acara di masyarakat seperti pengajian, hajatan, rapat organisasi/LSM dan acara-acara lainnya. Maka dari itu penulis menetapkan enam informan atau narasumber yang telah diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan, namun pada saat konfirmasi terhadap informannya secara langsung ada yang tidak berkenan untuk penulis wawancarai dengan alasan bahwa beliau hanyalah orang kampung bisasa dan tidak cocok atau relevan dengan topik yang akan diwawancarakan. Maka dari itu terdapat 5 (Lima) orang informan. Berikut ini merupakan deskripsi kelima orang informan yang telah dapat penulis wawancarai:

1. KH. Zainal Arifin.
2. Gus Thoifur.
3. KH. Asmuni Fattah.
4. KH. Tufiq Suba'di.
5. Ust Idris Masruri.

Hasil Penelitian

1. Dampak Peran Politik Pemuka Agama Islam Dalam Proses Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2020

Pemuka agama Islam merupakan sosok yang dapat disebut sebagai salah satu sumber atau rujukan bagi sebagian orang untuk menanyakan keluhan kesah, masalah pribadi, hingga pandangan politik. Dalam kehidupan sosial masyarakat di Kab. Klaten, sisi religiusitasnya masih cukup kental terutama pada daerah-daerah yang berbasis agama seperti desa yang memproklamkan sebagai ranting Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang seperti ini cenderung masih mengkultuskan pandangan dan sikap politik pemuka agamanya karena selain merupakan salah satu pedoman atau kaki tangan para ulama' besar juga pendapatnya dapat dipercaya dengan adanya kalimat-kalimat menyejukkan yang terlontar entah untuk jamaahnya, teman-temannya, serta untuk wakga sekitar tempat tinggalnya.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa perbedaan bentuk sikap politik pemuka agama Islam dalam menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten di 2020. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pandangan pribadi seorang pemuka agama terhadap politik itu sendiri dan bagaimana dahulu para guru dari pemuka agama ini mendidik tentang kegiatan berbangsa dan bernegara. Contohnya ada beberapa pemuka agama yang memang menganggap peran pemuka agama dalam percampuran politik itu sangat penting sehingga harus berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut seperti contohnya K.H Zainal Arifin yang sangat menekankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan untuk memerangi paham yang akan merusak kedaulatan Negara Indonesia dengan mengajak seluruh jamaah dan orang-orang terdekatnya untuk memilih salah satu tokoh politik, atau seperti Gus Thoifur yang lebih memilih untuk tidak terlalu mencampuri urusan politik karena rentan terhadap aksi nepotisme dan black campaign. Kedua pandangan ini tentu saja memiliki tujuannya masing-masing sesuai dengan prinsip dan pendidikan yang telah tertanamkan pada pemuka agama tersebut.

Jika dilihat beberapa pemuka agama selain K.H Zainal Arifin, Bp Asmuni Fattah dan Gus Thoifur, beberapa pemuka agama yang lain menjalankan partisipasi politik yang berbentuk kolektif seperti K.H

Taufik Suba'di dan Bp. Idris Masruri yakni dengan cara langsung dalam sebuah forum pengajian langsung memberikan pandangan dan sikap politik beliau terkait pesta demokrasi yang akan datang yang dalam hal ini adalah Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. Bentuk konkretnya adalah pemuka agama ini memberikan argumen-argumen dan pandangannya terhadap kegiatan politik yang berlangsung dalam bentuk Maudho Hasanah yang disela-sela juga dengan materi keagamaan yang juga dibahas pada saat itu. Selain menghemat waktu yang ada, bentuk partisipasi seperti ini juga cukup efektif untuk memberikan edukasi terkait politik kepada jamaahnya sehingga kedua ilmu yang diberikan pada saat itu yakni ilmu agama dan ilmu politik dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Beberapa pemuka agama juga tak jarang memberikan sesi tanya jawab terkait paparan yang ingin diketahui oleh jamaahnya seperti amalan-amalan hingga tips untuk memilih para elit politik terkhusus peserta Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020 kemarin. Bentuk partisipasi politik kolektif ini adalah bentuk partisipasi paling ideal yang dapat dilakukan oleh pemuka agama karena sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut yakni berdakwah dengan metode ceramah. Dan dalam penelitian ini yang menggunakan metode ini adalah K.H Taufik Suba'di, Bp Idris Masruri, dan KH. Zainal Arifin. Untuk selain itu yakni Gus Thoifur dan Bp. Asmuni Fattah lebih memilih partisipasi yang individual yakni hanya lingkup terkecil dari jamaahnya yang bertanya atau hanya pada satu lawan bicaranya saja.

Dengan berbagai gelar masyarakat yang dimilikinya serta dogma agama yang dipegangnya maka pemuka agama Islam sangat dengan mudah mempengaruhi berbagai golongan masyarakat yang mengikutkannya. Pemuka agama Islam yang dalam masyarakat sering menjadi ujung tombak kebijakan dikala musyawarah mempunyai track record yang baik untuk mengungkapkan pendapat yang dipercayai oleh masyarakat, terkhusus pada lingkungan sekitarnya yakni tetangga satu kampung dan jamaah-jamaahnya. Kebanyakan pemuka agama Islam memiliki pengikut yang setia dikarenakan pengikut tersebut merasakan sesuatu yang tidak dirasakan pada saat dekat dengan orang lain seperti rasa sejuk dan tenang sehingga tanpa disadari pengikut tersebut memiliki rasa takdzim yang tinggi terhadap pemuka agama Islam yang diikutinya. Biasanya pengikut pemuka agama seperti inilah yang akan sangat mempertimbangkan pendapat pemuka agama tersebut termasuk pendapat dalam urusan politik. Ada banyak juga jamaah pengikut pemuka agama tertentu yang sudah memiliki pilihan politik yang menurutnya tepat tapi setelah dikonsultasikan kepada pemuka agama Islam tertentu justru berubah karena kepandaian pemuka agama tersebut dalam berbicara dan menyampaikan argumen-argumen politiknya.

2. Relasi Antara Pemuka Agama Islam Dengan Elit Politik Peserta Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2020

Amanah sebagai pemuka agama Islam merupakan sebuah jabatan kultural yang tanggung jawabnya besar baik itu kepada Tuhan YME maupun kepada masyarakat. Menjadi pemuka agama Islam di sebuah daerah tentu tak luput dari pertimbangan elit politik yang mencari suara di daerah tersebut sesuai dengan wilayah dakwah masing-masing pemuka agama Islam. Wilayah dakwah yang dimaksud adalah tempat dimana pemuka agama tertentu melakukan dakwahnya seperti K.H Zainal Arifin di sekitar kediaman beliau dan beberapa daerah lain, Bp. Asmuni Fattah di desa tempat tinggal yang sekaligus berdiri Pondok Pesantren Al Fattah, Gus Thoifur yang memiliki wilayah dakwah di kediamannya serta di beberapa daerah sekitar Kecamatan Ceper, Klikotes, Trucuk, dan Pedan. Hal ini menunjukkan bahwasannya para pemuka agama Islam ini memiliki dampak suara yang besar terhadap pilihan politik jamaah disetiap wilayah dakwahnya masing-masing.

Karena posisi pemuka agama Islam yang strategis inilah banyak elit politik terkhusus peserta Pemilu yang datang kepada beliau-beliau ini untuk meminta dukungan berupa suara dalam proses Pilkada langsung di Kabupaten Klaten tahun 2020. Hal inipun antara satu tokoh dengan tokoh yang lain berbeda pendapat seperti Bp. Asmuni Fattah yang mewajibkan seorang pemuka agama Islam

mempunyai relasi dengan tokoh politik agar supaya ketika menjadi kandidat yang terpilih kelak kebijakannya dapat dikontrol agar sesuai dengan syari'at Islam dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ada juga yang bersikap moderat saja dengan artian boleh-boleh saja seorang pemuka agama Islam memiliki relasi dengan elit politik asalkan dengan syarat hubungan relasi tersebut memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat terutama bagi umat Islam yang ada di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, sikap para pemuka agama Islam tersebut memang sangat dipengaruhi oleh didikan guru-guru beliau semasa belajar di pesantren. Sikap politik tersebutpun dalam wawancara bersama Gus Thoifur pada setiap pondok pesantren memiliki khittah yang berbeda-beda tergantung pada aliran apa pondok pesantren tersebut berjalan, ada pondok pesantren yang moderen dengan berbagai keilmuan diajarkan termasuk ilmu politik dan ada juga pesantren konservatif yang masih berpatokan pada kitab-kitab klasik zaman dahulu. Hal inilah yang membedakan pandangan-pandangan para pemuka agama Islam dalam menyikapi fenomena politik yang ada disekitarnya.

3. Dampak Minimnya pengetahuan politik masyarakat membuat rendahnya kedewasaan demokrasi di Kabupaten Klaten.

Menurut Ajat Sudrajat dkk (2016: 29) "apabila berbicara mengenai manusia pasti akan didapati suatu kenyataan bahwa manusia adalah pemeluk dari suatu agama tertentu". Agama yang dimaksud disini adalah artian agama dalam universal dimana setiap agama yang memiliki konsep teologis yang berpusat pada suatu objek yang disebut sebagai "Tuhan". Dengan teori tersebut maka umat manusia terbelenggu kepada suatu semesta yang membuat manusia selalu membutuhkan "Tuhan" dalam berbagai bidang. Eksistensi tuhan dalam kehidupan politik kerat kaitannya dengan kehidupan bernegara yang lebih baik. Oleh karena itu masyarakat dalam menghadapi politik menurut Ajat Sudrajat dkk (2015: 331) pada dasarnya adapat diringkas dalam dua pandangan yakni pandangan yang merefleksikan kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal agama Islam yang kemudian disebut sebagai "Syariah" dan pandangan kedua pandangan yang merefleksikan kecenderungan untuk menekankan kepada aspek legal dan formal substansial sebuah negara yang berdaulat.

Dalam kehidupan politik Di Indonesia, pandangan politik pertama lah yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat sehingga aspek agama terutama agama Islam sangat berpengaruh kepada jalannya proses Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. Untuk merangkul berbagai pihak yang menerapkan pandangan ini maka pemuka agama Islam muncul sebagai kaki tangan tuhan di dunia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terutama yang berkaitan dengan Pilkada Klaten tahun 2020. Seperti yang diungkap oleh Bp. Taufiq Suba'di, kebanyakan ketika masa kampanye berlangsung banyak elit politik datang kepada pemuka agama Islam untuk meminta do'a restu serta dukungan dari pemuka agama dan jamaahnya untuk berlaga dalam Pilkada Kabupaten Klaten 2020. Langkah yang biasa dilakukan oleh elit politik peserta pilkada adalah sowan ke kediaman pemuka agama Islam. Menurut pengakuan Bp. Taufiq Suba'di, banyak motif elit politik ketika datang berkunjung di kediaman pemuka agama Islam seperti mencari dukungan entah menggunakan cara-cara yang legal maupun ilegal. Bp. Taufiq Suba'di sendiri telah sering menerima berbagai elit politik yang ingin menyogok untuk memenangkan pasangan calon tertentu di daerah tempat beliau berdakwah, mulai dari ajakan yang memaksa hingga adanya politik uang dan kampanye gelap. Tentu saja dalam hal ini Bp. Taufiq Suba'di sebagai pemuka agama Islam menolak permainan kotor elit politik tersebut dan Bp. Taufiq Suba'di hanya bisa menyampaikan dan memberikan sedikit waktu disela-sela beliau berdakwah.

Ada juga bentuk partisipasi pemuka agama Islam lain yang lebih masuk kedalam perhelatan politik tersebut yakni KH. Zainal Arifin. Beliau dalam jabatannya di PCNU Kabupaten Klaten adalah

sebagai Syuriah PCNU sering mendapatkan perintah dari atasan yakni PCNU Kabupaten Klaten untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon yang sejalan dengan PBNU, begitu juga yang dilakukan oleh BP. Asmuni Fattah. Beliau berdua dalam ajang Pilkada Kabupaten Klaten berperan sebagai tim kampanye lewat organisasi yang beliau ikuti yakni PBNU. Setelah PBNU memerintahkan seluruh kadernya untuk mengkampanyekan salah satu elit politik maka tentu saja setiap pemuka agama Islam berbeda-beda bentuknya. Ada yang langsung menyuarakan kampanye di mimbar-mimbar pengajian yang besar dan ada juga yang mengkampanyekan elit politik dukungannya dengan kelompok-kelompok kecil diluar kegiatan pengajian.

Sikap-sikap dan reaksi jamaah seperti ini tidak jauh berbeda dengan pemuka agama yang lain terkecuali ketika pemuka agama Islam tersebut melakukan suatu sikap politik yang menurut masyarakat adalah sikap menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemuka agama Islam. Bp. Asmuni Fattah dalam wawancaranya mengatakan apabila seorang pemuka agama Islam tidak mencerminkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh pemuka agama dan lebih cenderung ikut serta menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan Pilkada Klaten 2020 serta ikut menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dan ikut juga dalam kegiatan ilegal seperti kampanye gelap dan politik uang, maka taruhannya adalah kredibilitas pemuka agama Islam tersebut dalam jalan dakwahnya. Ketika masyarakat telah mengetahui sikap buruk pemuka agama Islam maka masyarakat akan cenderung menjauh dan tidak mengikuti saran serta nasehat dari pemuka agama itu, dan jika itu terjadi kepada saya yang mempunyai pondok pesantren maka akan sangat berdampak besar kepada eksistensi pondok pesantren tersebut. Selain itu juga pertanggung jawaban di akhirat kelak akan lebih berat karena yang melakukan tindakan kotor itu adalah pemuka agama Islam.

Pembahasan

Fenomena pluralitas kultur sosial yang ada Di Kabupaten Klaten pada zaman dulu sangat erat kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan akan adanya tuhan mulai dari paham-paham teologisme seperti penganut kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian berkembang menjadi sebuah kepercayaan dan masuklah agama pertama Di Nusantara yakni Hindu-budha yang secara kultur sangat mempengaruhi. Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme, Azhuri (2012: 14). Setelah masuknya agama Hindu-Buddha dan terjadi perkembangan yang signifikan terutama dalam kehidupan kultur sosial masyarakat, kemudian masuklah agama Islam yang kemudian menggeser popularitas agama-agama sebelumnya yang sudah meradikal Di Klaten. Agama Islam ini pada saat masuk dibawa oleh Wali Songo yang kemudian menyebar dengan luas ke penjuru Pulau Jawa dan tak terkecuali Di Klaten melalui Sunan Pandanaran dan Ki Ageng Gribig, Islami, M.E.N., & Ikhsanudin, M. (2014: 107).

Masuknya agama Islam ini kemudian melebur bersama kultur yang telah terbentuk sejak zaman dulu, termasuk bagaimana ritual-ritual keagamaan itu dilaksanakan seperti sekarang yang kita tau ada Yaqqawiu, Tahlilan, Peringatan kematian, dan masih banyak lagi. Bentuk pluralitas budaya dan agama, bisa dimanifestasikan pada ritual atau upacara Yaqowiyuu di Desa Jatinom, Klaten Jawa Tengah. Masyarakat Jatinom merupakan pemeluk Islam yang taat. Keberagamaan mereka tidak lepas dari keberadaan Ki Ageng Gribig yang dianggap sebagai kyai yang menyebarkan Islam di Jatinom pada masa Walisongo, Amaliyah, I.E (2015: 41). Bentuk-bentuk manifestasi peleburan agama dan budaya ini masih bisa disaksikan hingga sekarang.

Kehadiran pemuka agama Islam Di Klaten menjadi salah satu tonggak perkembangan Di Klaten dengan berperannya sosok pemuka agama Islam menjadi tokoh sentral masyarakat yang kemudian dalam kesehariannya berperan sebagai pemberi nasihat religius, peran sebagai ahli ekonomi, sosial, budaya dan bahkan menjadi pemimpin politik, Basuki & Isbandi (2008:16). Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Klaten sudah sejak dahulu merupakan sebuah kumpulan masyarakat-masyarakat yang religius entah siapapun itu tuhannya. Kemudian datanglah Islam yang mulai dianut

oleh kebanyakan warga Di Klaten hingga saat ini dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 90% lebih masyarakat Klaten, BPS Kab. Klaten (2015).

Dalam perjalanannya, masyarakat religius ini tak selalu harmonis dengan berbagai permasalahan muncul, terutama ketika menjelang Pilkada Kabupaten Klaten yang salah satu pemicu pertikaian antar masyarakatnya adalah perbedaan pandangan politik walau satu agama. Gesekan-gesekan ini diminimalisir oleh Pemda Klaten, Kamtibmas, dan Kemenag dengan berbagai cara, salah satunya dengan merangkul pemuka agama untuk ikut berpartisipasi meredakan suhu politik yang ada. Disinilah peran pemuka agama terutama agama Islam sangat dipertimbangkan karena masyarakat Kabupaten Klaten adalah masyarakat religius yang mendengarkan himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemuka agama yang mereka percayai. Peran pemuka agama dalam mengatasi hal ini adalah peran kepemimpinan, Basuki/Isbandi (2008:15).

Peran kepemimpinan ini merupakan sebuah peran dimana pemuka agama Islam menjadi penengah dengan melerai berbagai potensi dan konflik yang timbul di tengah masyarakat terutama di sekitar pemuka agama Islam. Konflik merupakan suatu pertentangan dan perselisihan yang terjadi antara dua pihak. Ia terjadi ketika kedua-duanya menginginkan suatu keperluan yang sama, Bharuddin Che Pa & Matsyah, A (2013). Sekiranya sesuatu konflik politik yang terjadi itu gagal diintegrasikan atau dikelola dengan baik, ia akan mengundang konflik yang berpanjangan, malah membawa kepada peperangan, Hanafi, M.S (2017). Oleh karena itu langkah seperti ini perlu dilakukan agar Pilkada dan Pemilu-Pemilu lainnya dapat berjalan dengan baik.

Berbagai cara dilakukan oleh pemuka agama Islam dalam menyambut pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020 yang berada pada masa pandemi ini seperti contohnya pemuka agama Islam dapat memberikan nasihat dan himbauan kepada masyarakat terkhusus jamaahnya untuk senantiasa mengikuti anjuran pemerintah untuk berpartisipasi dalam proses pergantian kekuasaan ini. Selain itu sosok pemuka agama Islam dapat juga membuka diskusi-diskusi kecil untuk saling bertukar pikiran kepada jamaahnya terkait topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Klaten yang akan melaksanakan Pilkada. Bahkan jika bisa, pemuka agama Islam ikut terjun langsung menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan Pilkada ini dengan menjadi seorang panitia, pengurus KPU, atau bahkan hingga menjadi tim sukses salah satu Paslon yang berlaga dalam Pilkada Klaten 2020 ini. Meskipun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofianto, A. (2015: 169), bahwa peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengarahkan pilihan terhadap masyarakat sudah sangat berkurang perannya. Di sisi lain, pengaruh media massa semakin kuat dalam mempengaruhi orientasi pemilih.

Berbagai macam bentuk sikap politik pemuka agama Islam menjadikan reaksi masyarakat terhadap sikap politik pemuka agama Islam berbeda-beda pula, ada yang mengkultuskan dalam arti menganggap pendapat dan sikap politik pemuka agama Islam itu adalah sebuah kebenaran karena berbagai faktor yang ada dan ada juga yang menganggap bahwa sikap politik pemuka agama Islam hanyalah untuk referensi saja karena sikap politik dan pilihan politik adalah hak setiap individu untuk memutuskan seperti apa. Seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa narasumber yang ada, menurut Gus Thoif terdapat sejumlah masyarakat yang menganggap sikap politik dan pendapat politik wajib ditiru adalah karena bersumber dari syari'at Islam yang mana sikap politik yang tercipta dari sosok pemuka agama Islam tidak akan bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu Bp Asmuni juga berdalil bahwa sikap politik pemuka agama Islam wajib ditiru adalah karena di dalam masyarakat, pemuka agama Islam merupakan seorang tokoh sentral dimana semua gerak gerik dan tindakannya mencerminkan sikap politik umat Islam. Bp Idris juga berpendapat bahwa sikap politik pemuka agama Islam wajib ditiru adalah karena jika dilihat di Pancasila sila pertama maka pemuka agama Islam lah yang menjadi sosok representatif kehadiran Tuhan dalam masyarakat. Bp Taufiq dan KH Zainal juga

berpendapat bahwa sikap politik pemuka agama Islam patut dicontoh karena berlandaskan syariat Islam.

Terdapat pula pendapat yang menjelaskan bahwa sikap politik pemuka agama Islam hanyalah referensi seperti yang dikatakan oleh Gus Thoif dimana beliau berpendapat bahwa sikap politik adalah hak individu masing-masing orang dan tidak perlu tertaut dengan sikap politik pemuka agama Islam yang dipercayainya. Sedangkan KH Zainal mengungkapkan terdapat sebuah peristiwa dimana beliau dibantah oleh jamaah terkait sikap politik yang beliau lakukan dan hal tersebut mencerminkan bahwa seorang muslim tidak perlu wajib ikut sikap politik pemuka agama Islam dan berhak percaya dengan hati nuraninya. Bp Asmuni juga memiliki pengalaman serupa dimana ketika beliau sangat condong kepada salah satu pasangan calon, reaksi masyarakat cenderung cuek dengan apa yang diutarakan oleh Bp Asmuni, hal ini juga menunjukkan bahwa sikap politik masih menjadi hak privat masing-masing individu dalam masyarakat.

Budaya politik merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan bagaimana kehidupan politik masyarakat akan terbentuk, yang mana budaya politik ini terbentuk dari berbagai macam fenomena politik, peristiwa politik, bahkan hingga seberapa wawasan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya, Budiarjo, M. (1981).

Sosok pemuka agama juga berperan dalam membentuk budaya politik masyarakat dikarenakan proses pembentukan budaya politik sendiri adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat, Saleh K. & Munif A (2015: 312). Peran sosok pemuka agama Islam yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran pengabdian, dimana peran inilah yang akan menjadi peran yang secara langsung berurusan dengan kehidupan sosial masyarakat bahkan hingga kehidupan politik masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa sosok pemuka agama Islam dalam melakukan pengabdian memerlukan sebuah interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah dengan adanya sebuah kegiatan yang mengumpulkan antara pemuka agama Islam dengan masyarakat secara langsung seperti saat adanya musyawarah dan kajian-kajian. Dalam dua kesempatan ini memungkinkan sosok pemuka agama memberikan berbagai ajarannya kepada masyarakat tentang segala hal dan bahkan tentang politik.

Setiap dampak yang tercipta merupakan hasil dari bagaimana proses transmisi informasi itu terjadi, hal ini berkaitan dengan komunikasi politik. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam dakwah sosok pemuka agama Islam dengan perannya yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Bagaimana bentuk komunikasi politik pemuka agama Islam ini terhadap masyarakat akan mempengaruhi hasil komunikasi tersebut. Komunikasi antara pemuka agama Islam dengan masyarakat ini adalah sebuah proses pertukaran informasi untuk menyambung kesamaan pengertian dan hakikat, Shoelhi (2009: 2). Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh para pemuka agama Islam ini merupakan komunikasi politik, yang tak lain adalah pertukaran informasi, makna dan hakikat mengenai kehidupan politik masyarakat di daerah mulai dari kehidupan sosial politik, penentuan sosok pemimpin hingga perumusan, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan adanya berbagai bentuk peran politik pemuka agama Islam, berbagai macam relasi politik antara pemuka agama Islam dengan elit politik, hingga berbagai macam reaksi masyarakat yang ada di kabupaten Klaten dapat menjadi bahan pembelajaran, penambah wawasan, hingga menjadi salah satu sumber studi bagi akademisi lain untuk meneliti fenomena yang terdapat keterkaitan dengan tema penelitian ini. Bentuk peran politik dalam masyarakat sangat beragam menurut Barnawi (dalam Supartini, 2018: 4), mulai dari: (1) peran kaderisasi, tokoh agama bergabung dalam suatu wadah (pengabdian diri) yang dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi, dimana dalam peran ini pemuka agama Islam mendirikan sebuah perkumpulan kecil untuk saling

berbagi cerita dan pengalaman yang kemudian ditanggapi oleh pemuka agama Islam dengan dalil dan dasar syari'at Islam; (2) peran pengabdian, seorang tokoh agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Di mana tokoh agama harus hadir ditengah-tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan, seperti yang dilakukan oleh mayoritas pemuka agama dalam penelitian ini dimana hamper di setiap hari beliau mengisi berbagai perkumpulan dan majelis guna menyebarkan ilmu dan dakwah agama Islam; (3) peran dakwah, tokoh Agama Islam berperan menangkal praktik kehidupan yang tidak benar dan meluruskan ke jalan yang benar, menggunakan gagasan yang kreatif, mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang membangun, menemukan, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa yang akan datang lebih baik. Peran dakwah ini adalah peran pokok seorang pemuka agama Islam yang menggunakan posisi sosial keagamaannya untuk membimbing masyarakat terkhusus perihal fenomena dan wawasan politik.

Berbagai fenomena serta peristiwa politik yang terdapat pada penelitian ini dapat menjadi sebuah bentuk wawasan kebangsaan yang merujuk pada sebuah konsep kajian kewarganegaraan. Untuk mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan cita-cita bangsa, maka harus dimulai dengan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan Kewarganegaraan, Berlian R.K & Dewi D.A (2021: 487). Berbagai fenomena dan peristiwa politik yang terjadi turut membentuk budaya politik masyarakat Di Kabupaten Klaten. Sebagai sebuah konsep kajian, Pendidikan kewarganegaraan mewadahi berbagai teori dan konsep mengenai politik dan kebangsaan sehingga berbagai fenomena yang terjadi dapat menjadi bahan ajar serta wawasan bagi pengajar maupun pelajar yang sedang mengampu pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan.

Hasil dari kolaborasi antara konsep-konsep dan teori dalam Pendidikan kewarganegaraan dan berbagai fenomena dan peristiwa politik yang terjadi dan tentunya dekat dengan kehidupan sosial masyarakat membuat wawasan politik dan kebangsaan masyarakat Di Kabupaten Klaten meningkat karena terdampak langsung pada kehidupan masyarakatnya. Perjuangan menegakkan demokrasi adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi diyakni sebagai sistem politik dan pandangan hidup yang dapat menjamin penghargaan atas hak dasar manusia yang selanjutnya memberi perlindungan dan penegakkan terhadap hak dasar tersebut. Maka, unsur pokok dari sebuah demokrasi adalah perwujudan dari pengakuan akan hak asasi manusia, Berlian R.K & Dewi D.A (2021: 487). Terciptanya masyarakat yang demokratis adalah salah satu hasil dari suksesnya pendidikan kewarganegaraan sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM).

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bentuk sikap politik pemuka agama Islam sangat bermacam-macam yang mana bentuk-bentuk ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti didikan guru-guru para pemuka agama tersebut sewaktu masih di pesantren, pengetahuan tentang politik yang ada, hingga pandangan-pandangan pribadi pemuka agama tersebut terhadap kondisi sosial politik yang ada yang mengharuskan para pemuka agama Islam ini harus menentukan sikap politiknya. *Kedua*, tentang relasi terhadap elit politik setiap pemuka agama Islam memiliki pandangannya masing-masing mulai dari harus melakukan relasi, pendekatan, hingga membuntutinya untuk memastikan kebijakannya sejalan dengan tujuan masyarakat, namun juga ada yang membatasinya dan hanya pasif karena dunia politik sarat akan kepentingan negatif yang menurut para pemuka agama Islam yang membatasi dirinya dari relasi terhadap elit politik ini memiliki mudharat yang lebih besar daripada harus bergabung dan mengawasinya dari dalam seperti sikap sebelumnya. *Ketiga*, setelah pemuka agama Islam menyatakan sikap politiknya ternyata banyak reaksi yang timbul yang diakibatkan pemuka agama tersenut menunjukkan sikap politiknya mulai dari ada yang nurut dengan pandangan-

pandangan politik pemuka agama tersebut hingga pandangan-pandangan dan sikap politik pemuka agama Islam hanya dijadikan sebagai referensi untuk membantu jamaah atau masyarakat memilih calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilu Kabupaten Klaten tahun 2020.

Referensi

- Amaliah, E.I. (2015). Relasi agama dan budaya lokal: upacara yaqowiyyu masyarakat jatinom klaten. *Fikrah: jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan*, 3, 37-56.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Penduduk menurut kecamatan dan pemeluk agama di kabupaten klaten tahun 2015*. Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- Basuki & Isbandi. (2008). Konstruksi sosial peran pemuka agama dalam menciptakan kohesivitas komunikasi sosial di kota mataram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, 13–24.
- Berlian R.K & Dewi D.A (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 09, 486-498.
- Bharuddin Che Pa & Ajidar Matsyah. (2013). Konflik politik dan penyelesaiannya menurut perspektif Islam. *Kertas Kerja Konferensi Antara bangsa Islam Borneo VI, anjuran UiTM Sarawak*.
- Budiardjo, M. (1981). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan VI. Jakarta: PT. Gramedia.
- Citramanik, L.G.R & Laksmi, N.K.P.A. (2019). Peran Pemuka agama dalam birokrasi pemerintahan raja marakata. 23. 224-231.
- Hanafi, M.S. (2017). *Metode Pengelolaan Konflik Politik: Analisis Kasus Konflik Politik Ali-Mu'awiyah*. Neo-Bis, 11.
- Islami, M.E.N., & Ikhsanudin, M. (2014). Simbol dan makna ritual yaqowiyu di jatinom klaten. *Jurnal Media Wisata*, 12, 102-115.
- Mona, E. & Ikhsanudin, M. (2014). Simbol dan makna ritual yaqowiyu di jatinom klaten. *Media Wisata*, 12, 102-115.
- Nambo A.B. & Puluhulua, M.R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). *Mimbar*, 2, 262–285.
- Nurmalisa, A.M & Rohman. (2020). Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun civic conscience. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 07, 34-46.
- Purbaya, A. (2020). Ini para jagoan PDIP yang tersungkur di kandang banteng jateng. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5289345/ini-para-jagoan-pdip-yang-tersungkur-di-kandang-banteng-jateng> pada 8 Januari 2022.
- Ridwan. (2017). Hubungan islam dan politik di indonesia perspektif pemikiran hasan al-banna. *Samudra Keadilan*, 12, 223-236.
- Sakdiyah. (2016). Karakteristik kepemimpinan dalam islam (kajian historis filosofis) sifat-sifat rasulullah. *Al Bayan*, 22, 29-49.
- Saleh, K. dan Munif, A. (2015). Membangun karakter budaya politik dalam berdemokrasi. *ADDIN*, 2, 309-332.
- Siyoto, S & Sodik, M.A, (2015), *Dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media.
- Shoelhi, M. (2009). *Komunikasi internasional: perspektif jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sofianto, A. (2015). Peran agama terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2014 di jawa tengah. *Journal of Social Science and Religion*, 22, 161-172.
- Sudrajat, A., Marzuki., Suparlan., et al. (2016). *Dinul islam: pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta.
- Supartini. (2018). peran tokoh agama dalam mening- katkan sikap keberagaman masyarakat di dusun pucung desa sendang ngrayun ponorogo. *Skripsi tidak diterbitkan*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Tempo.co (2017). Dinasti politik ala klaten. Diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1000958/dinasti-politik-ala-klaten/full&view=ok> pada 8 Januari 2022.
- Toweren, K. (2018). Peran tokoh agama dalam peningkatan pemahaman agama masyarakat kampung toweren aceh tengah. *Dayah*, 2, 258-272.

Winataputra, U. & Budimansyah, D. (2012). Pendidikan kewarganegaraan: dalam perspektif internasional (konteks, teori, dan profil pembelajaran). Bandung: Widya Aksara Press.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peran Politik Pemuka Agama Islam dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020
Nama : Muhammad Rizqon Nur Hafidh
NIM : 17401241052
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 31 Januari 2022

Reviewer,

Dr. Suharno., S.Pd., M.Si
NIP. 19680417 200003 1 001

Pembimbing,

Dr. Samsuri., S.Pd., M.Ag.
NIP. 19720619 200212 1 001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain